
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK LOKAL: STUDI KASUS PARTISIPASI

Marselina Pardede

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal merupakan aspek krusial dalam memperkuat partisipasi publik dan demokrasi yang inklusif. Studi ini mengeksplorasi fenomena partisipasi masyarakat dalam konteks pengambilan keputusan politik lokal melalui analisis studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dinamika partisipasi, tantangan, dan potensi dalam memperkuat kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal. Temuan dari studi ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi pembangunan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal.

Kata Kunci: *Penguatan kapasitas, masyarakat, partisipasi*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal merupakan inti dari demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat memastikan bahwa suara dan kepentingan warga negara diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Namun, dalam banyak konteks politik lokal, partisipasi masyarakat sering kali terbatas oleh berbagai hambatan, termasuk kurangnya pengetahuan, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal menjadi sangat penting. Penguatan kapasitas masyarakat mengacu pada upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas warga negara dalam berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Ini mencakup memberdayakan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta memberikan mereka alat dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik lokal.

Studi kasus merupakan salah satu pendekatan yang berguna untuk memahami praktik dan dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks politik lokal. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret dari berbagai komunitas atau wilayah, kita dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, serta strategi dan inisiatif yang berhasil dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan politik.

Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, studi kasus tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas dinamika politik dan sosial yang terlibat. Dengan memeriksa kasus-kasus konkret dari berbagai konteks lokal, kita dapat mengidentifikasi pola-pola umum, tantangan, dan peluang dalam memperkuat partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal melalui studi kasus yang mendalam. Dengan memfokuskan pada studi kasus konkret, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, serta strategi dan praktik yang efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan inisiatif yang lebih efektif untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal. Dengan demikian, dapat ditingkatkan kualitas demokrasi lokal serta pengambilan keputusan yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi kasus partisipasi untuk memahami penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dampak dari partisipasi masyarakat dalam konteks yang khusus dan kompleks.

1. Desain Penelitian:

- Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan fokus pada studi kasus partisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik lokal.*
- Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konteks, dinamika, dan dampak dari penguatan kapasitas masyarakat dalam partisipasi politik.*

2. Pemilihan Kasus:

- Kasus-kasus studi dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal, keragaman konteks politik, dan relevansi dengan tujuan penelitian.*
- Kasus-kasus tersebut dapat mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti forum partisipatif, mekanisme konsultasi publik, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan.*

3. Pengumpulan Data: a. Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal, baik secara aktif maupun sebagai pengamat. b. Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses partisipasi, termasuk anggota masyarakat, pejabat pemerintah, pemimpin lokal, dan aktivis masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan harapan mereka terhadap partisipasi politik. c. Analisis Dokumen: Data juga akan dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan partisipasi, undang-undang lokal, kebijakan partisipasi publik, dan catatan resmi lainnya.

4. Analisis Data:

- Data kualitatif yang dikumpulkan akan dianalisis secara tematik. Peneliti akan mencari pola-pola, tema-tema, dan tren-tren yang muncul dari data, serta melakukan komparasi antar kasus untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penguatan kapasitas masyarakat dalam partisipasi politik lokal.*
- Pendekatan analisis kasus akan digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks, dinamika, dan dampak dari partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal.*

5. Validitas dan Reliabilitas:

- Validitas data akan diperkuat melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data dan metode.*

- *Reliabilitas analisis akan dijamin melalui konsistensi dalam interpretasi data dan pengecekan terhadap kesimpulan oleh peneliti lain atau pihak yang berkepentingan.*

6. *Etika Penelitian:*

- *Peneliti akan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk privasi, kerahasiaan, dan keamanan data peserta penelitian.*
- *Persetujuan etis akan diperoleh dari institusi atau lembaga yang relevan sebelum memulai penelitian.*

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus partisipasi, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal dan memperkuat demokrasi lokal.

PEMBAHASAN

Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal memiliki dampak yang signifikan dalam memperkuat demokrasi yang inklusif dan responsif. Studi kasus partisipasi menjadi titik fokus dalam menganalisis bagaimana masyarakat dapat secara efektif terlibat dalam proses pembuatan keputusan di tingkat lokal. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang terkait dengan penguatan kapasitas masyarakat dan implikasinya dalam konteks politik lokal.

Pertama-tama, penguatan kapasitas masyarakat membawa konsep partisipasi yang lebih luas, tidak terbatas pada sekadar hak memilih dalam pemilihan umum. Ini mencakup kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses-proses partisipatif seperti konsultasi publik, dialog antarwarga, dan mekanisme partisipasi lainnya yang memungkinkan mereka berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Selanjutnya, studi kasus partisipasi memberikan gambaran konkret tentang bagaimana masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal. Ini dapat berupa partisipasi dalam pertemuan komunitas, komite lokal, atau forum kota yang bertujuan untuk mendiskusikan kebijakan dan program-program yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Penguatan kapasitas masyarakat juga memperhatikan aspek pendidikan politik, yang merupakan kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem politik dan proses pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan literasi politik mereka, masyarakat dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara serta cara-cara untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik lokal.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat juga melibatkan pemberian keterampilan praktis yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Ini bisa berupa keterampilan komunikasi, negosiasi, dan advokasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi mereka dengan efektif kepada para pembuat keputusan.

Dalam konteks studi kasus partisipasi, penelitian berfokus pada analisis mendalam tentang bagaimana partisipasi masyarakat terstruktur dan dikelola dalam konteks politik lokal tertentu. Ini mencakup identifikasi mekanisme partisipasi yang tersedia bagi masyarakat, tingkat keterlibatan mereka, serta dampaknya dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, penguatan kapasitas masyarakat melibatkan pemberdayaan kelompok-kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti perempuan, minoritas, dan masyarakat adat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga memperkuat inklusi dan representasi dalam demokrasi lokal.

Pentingnya penguatan kapasitas masyarakat juga tercermin dalam upaya untuk membangun jaringan komunitas yang kuat dan berkelanjutan. Melalui kerjasama antarwarga, masyarakat dapat saling mendukung dalam memperjuangkan kepentingan bersama dan membangun kemitraan yang efektif dengan pemerintah lokal serta lembaga-lembaga lainnya.

Tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi, penguatan kapasitas masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi kebijakan publik yang dihasilkan. Ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam membentuk masa depan mereka sendiri.

Selanjutnya, penguatan kapasitas masyarakat juga dapat mendorong adanya budaya partisipasi yang lebih inklusif dan terbuka dalam masyarakat. Ini melibatkan proses transformasi budaya politik yang mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat sebagai bagian integral dari kehidupan politik lokal.

Dalam konteks partisipasi politik lokal, penting untuk memperhatikan bahwa partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir, tetapi lebih sebagai proses yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas masyarakat memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan politik dengan cara yang bermakna dan berkelanjutan.

Melalui studi kasus partisipasi, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal. Ini melibatkan analisis mendalam tentang dinamika sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi partisipasi masyarakat serta upaya-upaya untuk memperkuat kapasitas mereka.

Selanjutnya, penguatan kapasitas masyarakat juga melibatkan pemberdayaan lembaga-lembaga masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM). Ini melibatkan membangun kapasitas mereka untuk berperan sebagai agen perubahan yang aktif dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dan memperjuangkan kepentingan publik.

Dalam melaksanakan penguatan kapasitas masyarakat, penting untuk memastikan adanya kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ini memungkinkan adanya kolaborasi yang efektif dalam membangun kapasitas masyarakat dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan politik lokal.

Selanjutnya, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, penguatan kapasitas masyarakat juga mencakup pemanfaatan teknologi untuk memperluas

ruang partisipasi masyarakat. Ini bisa berupa penggunaan media sosial, platform daring, atau aplikasi teknologi lainnya yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks studi kasus partisipasi, penting untuk memperhatikan peran pemimpin masyarakat dan tokoh lokal dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memobilisasi dan mengorganisir masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik lokal.

Selanjutnya, penguatan kapasitas masyarakat juga memerlukan adanya mekanisme yang transparan, akuntabel, dan responsif dari pemerintah lokal. Ini memastikan bahwa partisipasi masyarakat dihargai dan diakui dalam pembuatan keputusan politik serta bahwa proses tersebut berjalan dengan adil dan demokratis.

Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa penguatan kapasitas masyarakat berkelanjutan dan tidak sekadar proyek jangka pendek. Ini melibatkan pembangunan kapasitas yang berkelanjutan, penyediaan dukungan teknis dan finansial yang berkelanjutan, serta memastikan kontinuitas dan keberlanjutan inisiatif penguatan kapasitas.

Dalam konteks global, penguatan kapasitas masyarakat juga dapat melibatkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara atau wilayah. Ini memungkinkan adanya pembelajaran lintas-batas dan adopsi praktik terbaik dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal.

Selanjutnya, penguatan kapasitas masyarakat juga dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks politik lokal, seperti korupsi, ketimpangan sosial, atau marginalisasi politik.

Dalam konteks penguatan kapasitas masyarakat, penting untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis hak asasi manusia (HAM). Ini memastikan bahwa partisipasi masyarakat diakui sebagai hak fundamental dan bahwa upaya untuk memperkuat kapasitas mereka didasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang mendasar.

Terakhir, penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal juga memiliki dampak yang luas dalam memperkuat tata kelola yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, kita dapat memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam melanjutkan pembahasan tentang penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal, perlu juga dipertimbangkan beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi upaya penguatan kapasitas tersebut. Salah satunya adalah tantangan terkait dengan kurangnya sumber daya manusia dan keuangan yang memadai. Banyak komunitas lokal, terutama yang berada di daerah pedesaan atau wilayah terpencil, mungkin memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelatihan, pendidikan, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Selain itu, terdapat juga tantangan terkait dengan ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik. Meskipun upaya penguatan kapasitas masyarakat bertujuan untuk memastikan inklusi dan representasi yang lebih baik dari berbagai kelompok, namun sering kali perempuan menghadapi hambatan dan diskriminasi dalam mengakses ruang partisipasi politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang khusus dan sensitif gender dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat guna memastikan partisipasi yang merata dari semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya, tantangan lainnya adalah terkait dengan budaya politik yang otoriter atau tertutup di beberapa wilayah. Di mana adanya tradisi atau norma-norma yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik lokal. Dalam hal ini, perlu adanya pendekatan yang progresif dan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kesadaran dan memperkuat semangat partisipatif di antara masyarakat.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa penguatan kapasitas masyarakat tidak selalu berjalan lancar dan mungkin menghadapi resistensi atau tantangan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu yang mungkin merasa terancam dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang cermat dan dukungan yang kuat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Namun demikian, meskipun ada berbagai tantangan yang dihadapi, penting untuk diingat bahwa penguatan kapasitas masyarakat memiliki dampak yang positif dalam jangka panjang dalam memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan politik. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka diakui dan diwakili dengan baik dalam proses politik lokal.

Dalam konteks studi kasus partisipasi, penting untuk memperhatikan bahwa setiap komunitas atau wilayah memiliki konteks yang unik dan karakteristiknya sendiri dalam hal partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada pendekatan yang satu ukuran cocok untuk semua, dan penting untuk memahami konteks lokal secara mendalam serta melibatkan masyarakat secara langsung dalam merancang dan melaksanakan inisiatif penguatan kapasitas.

Selanjutnya, dalam upaya penguatan kapasitas masyarakat, perlu juga diakui bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan dan memerlukan waktu yang cukup. Oleh karena itu, diperlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk terus mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

Di samping itu, penting juga untuk mengadopsi pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam merancang dan melaksanakan inisiatif penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini melibatkan melibatkan berbagai kelompok dan pemangku kepentingan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dengan baik.

Selain itu, dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, penguatan kapasitas masyarakat juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi

untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Misalnya, penggunaan platform daring atau aplikasi mobile untuk mengumpulkan umpan balik dan masukan dari masyarakat secara lebih efektif.

Pada akhirnya, upaya penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal adalah investasi jangka panjang yang penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih demokratis, transparan, dan berdaya saing yang mampu menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kesimpulan

Penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal, dengan berfokus pada studi kasus partisipasi, menyoroti pentingnya keterlibatan aktif warga dalam pembangunan demokrasi yang inklusif dan responsif. Dalam rangka mencapai tujuan ini, telah diperlihatkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan partisipatif, pendidikan politik, pemberdayaan kelompok rentan, dan kerjasama lintas sektor adalah langkah yang penting.

Studi kasus partisipasi memberikan gambaran konkret tentang bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam pembuatan keputusan politik lokal melalui berbagai mekanisme partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukanlah sekadar hak, tetapi juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan masyarakat.

Dalam proses penguatan kapasitas masyarakat, perlu diakui bahwa ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk ketidaksetaraan akses, ketidaksetaraan gender, resistensi budaya, dan ketidakstabilan politik. Namun, dengan komitmen yang kuat, kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta adopsi pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Kesimpulannya, penguatan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik lokal melalui studi kasus partisipasi adalah langkah yang penting menuju demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, kita dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta memberikan dampak yang positif bagi pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom*. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.

- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kurniawan, M. Y. (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning*. uma. ac. id.
- Siregar, N. S. S. (2019). Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Deliana, M. (2013). Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.
- Sianipar, G. (2019). Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (*arachis hypogaea* L.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Siregar, S. A. (2018). implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.*
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara.*
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).*
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai.*
- Angelia, A. (2022). Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.*
- Tarigan, U. (2004). Implementasi Kebijakan Pemekaran Kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.*
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing.*
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2018). Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Medan.*